

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PACIRAN DESA TLOGOSADANG

Alamat : Jl. Raya Deandles No. 24 Tlogosadang Kode Pos 62264

PERATURAN DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN ANGGARAN 2014



KECAMATAN PACIRAN PEMERINTAH DESA TLOGOSADANG

PERATURAN DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN KEBUPATEN LAMONGAN NOMOR: 001 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOSADANG,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

- 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014;
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan: Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tlogosadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGOSADANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 280.900.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

	Pendapatan Belanja	Rp. 280.900.000		
D.	1) Langsung	Rp. 66.000.000		
	2) Tidak Langsung	Rp. 214.900.000		
C.	Pembiayaan	5		
	1) Penerimaan	Rp		

2) Pengeluaran

Pasal 3

Rp.

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

AMATA

Ditetapkan di Tiogosadang Pada Tanggal 6 Maret 2014

> KEPALA DESA TLOGOS ADANG

HI. MASYRIFATUN

Lampiran 1 : Peraturan Desa Tiogosadang Kec. Paciran

Kab. Lamongan

Nomor :

Tahun 2014

Tanggal :

Perihal : Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tlogosadang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2014

KODE	TAHUN ANGGARAN 2014				
REKE		TAHUN	TAHUN		
NG	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.	
1		(Rp.)	(Rp.)	11.	
1	DENDABATAN 2	3	4	5	
1,1	PENDAPATAN				
1.1.1	Pendapatan Asli Desa	58.350.000	65.750.000		
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.500.000			
1.1.1.2	Hasil Jalan Desa	2.000.000			
1.1.2	Hasil Sewa Kali (Sungai)	1.500.000	2.000,000		
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	1.500.000	1.750.000		
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa Sewa bengkok Kades	1.500.000	1.600.000		
1.1.3	Hasii Swadaya dan Partisipasi		150.000		
1.1.3.1	luran Pembangunan Desa	18.300.000		u.	
1.1.3.2	Juran Natura desa	18.000.000	8.200.000		
1.1.3.3	luran Melalui PLN		•		
1.1.4	Hasil Gotong Royong	300.000	300.000		
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	28.050.000	30.000.000		
1.1.4.2	Nilai Natura Hasil Gotong Royong	28.050 000	30.000.000		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
	Bagi hasil air bersih dari Weru komplek	7.000.000	23.500.000		
	Sertifikat Tanah Kas Desa		4.800.000		
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain	3.500.000	3.500.000		
	Bagi Hasil Pajak :	3.500.000	15.200.000		
	Bagi hasil Pajak Kabupaten / Kota	7.000.000	7.000.000		
	Paiak Pumi dan Panawasa (DRP)				
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Hasii Retribusi	7.000.000	7.000,000		
	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
	Alokasi Dana Desa				
		52.500.000	52.500.000	1	
	Bantuan Pembangunan Desa (Bandes) Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	41.500.000,00	41.500.000,00	{	
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,	11.000.000,00	11.000.000,00		
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya				
	Santuan Keuangan Pemerintah Pusat				
	Bantuan dari dana Perimbangan Keuangan Pemerintah				
	Pusat dan Daerah				
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Bantuan Keuangan Pemerintah				
		119.150.000	40.650.000		
	(abupaten/Kota	1101100100	1.000.000		
	PAPD Rades	96.000.000	32.000.000		
	TPAPD Perangkat Desa	3,650,000	3.650.000		
	unjangan Penghasilan BPD	5,000,000			
	Purna Bhakti Kepala Desa Purna Bhakti BPD	3.500.000			
	Suransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000		
	Bantuan Program E-KTP				
1.5.3.7 E	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000			
	Bantuan Pembentukan BPD	500.000			
	Bantuan : RT 12x250.000	3.000.000	3.000.000		
· L	Dailwall 111 12A200.000				
t e li	libah	75.000.000	115.000.000		
***	Bantuan Pembangunan Jalan Poros		40.000.000,00		
	PNPM Mandiri	75.000.000,00	75,000.000,00		
1.0.2	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga				
	JUMLAH PENDAPATAN				
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.8+1.7)	312.000.000	280.900.000	ليسي	
, (To I to I have been superiored to the superior of the superior				

1 1	2	3	4	5
	BELANJA			
		-		
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai Honor Pembangunan Kantor	-		
	Honor Pendapatan RT	3.000.000	3.000.000	
	Belanja Barang/Jasa Pengadaan ATK	8.600,000	5.350.000	
	Pengadaan ATK Pemeliharaan Inventaris Kantor	500.000	500.000	
	Ongkos Kantor dan Pembayaran Listrik	4.000.000	2.800.000	
	Biaya Pemeliharaan Jalan Desa	3,500.000	3.000.000	
	Baya Pemelina dan Jalah Besa Bantuan Dana PHBN dan Keagamaan	3.500.000	2.000.000	
.1.2.6	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.000.000	1.500.000	
	Perjalahan Dinas Repaid Desa Perjalahan Dinas Sekdes, Kasi dan Kaur	1,500.000	1.500.000	
	Biaya rapat	2.500.000	2.800.000	
.1.2.9	Biava Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	28.350.000	-	
	Belanja Modal			
.1.3	Belanja Modal Belanja Pemb. Renovasi Balai/			
.1.3.1	Kantor Desa Tlogosadang	-	•	
	Rantor Desa Tiogosadang Belanja Pembangunan Jalan makadam			
		-	29.050.000	
	Desa Tlogosadang Belanja Pembangunan Jalan cor			
.1.3.3	di Dusun Tlogosada∩g	5.500.000	5.500.000	
404	di Dusun Tiogosadang Belanja Pembangunan Jalan Tembus			
.1.3.4	Menuju Sidokelar	5.500.000	5.500.000	
	Menuju Sidokelai Belanja Pembangunan Jalan Cor			
2.1.3.5	di Dusun Tlogoringin	•	-	
	Belanja Pembangunan Balai Dusun Tlogoringin	29.050.000		
2.1.3.6	Belanja Modal Komputer Desa	3.500.000	3.500.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
	Belanja Pegawai/penghashan tetap	10.500.000	10.500.000	
2.2.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa		•	
2.2.3	Penghasilan Tetap Sekretaris Besu Penghasilan Tetap Kepala Dusun	2.100.000,00	2.100.000	
2.2.4	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah			
2.2.5	Desa (TPAPD) Kepala desa	9,600,000	9.600.000	
200	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000		
2.2.6	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah			
2.2.7	Desa (TPAPD) Sekretaris Desa		-	
	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah			
2.2.8	Desa (TPAPD) 1 Orang Kepala Dusun	9.600,000	9.600.000	
	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah			
2.2.9	Desa (TPAPD) 6 Orang Perangkat Desa			
		57.600.000	32.000.000	3 . : :
2044	(Kasih dan Kaur) Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4	Relanja Pembentukan BPD	500.000		
2.2.1.4.1	Purna Bhakti BPD	3.500.000	-	
2.2.1.4.2	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah			
2.2.1.4.3	Desa (TPAPD) Ketua BPD dan Anggotanya	3.650.000	3.650.000	
-				
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	75.000.000	75.000.000	
2.2.3.1	Belanja PNPM Mandiri		40.000.000	
2.2.3.2	Belanja Pembangunan Jalan Poros Belanja bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	•	
2.2.3.3	Delania Pentuan Social	1.000.000	1.000.000	<u></u>
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Dana Sosial	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.2	Asuransi Kepala Desa		-	
2.2.4.3	Belanja Bantuan Program E-KTP			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.1	Operasional Pemdes dari ADD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD dari ADD	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM dari ADD	3.000.000	3.000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK dari ADD	1.000.000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna dari ADD	500.000	500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu dari ADD	, 500.000		

2.2.4.7	Penghasilan Tetap Penanggung Jawab		
J-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	PBB (Upah Pungut PBB)	7.000.000	7.000.000
2.2.4.8	Biaya Pensertifikan Tanah Kas Desa	3.500.000	3.500.000
2.2.4.9	Biaya Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (2)	500.000	500.000
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1	Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000
	JUMLAH BELANJA(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	312.000.000	280.900.000
3.	PEMBIAYAAN		
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Penerimaan PembiayaanSisa Lebih		
	Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0;	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0;	0;
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0;	0;
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0;	0;
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	- 0;	0;
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0;	0;
3.2.3	Pembayaran Hutang	0;	0;
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0;	0;
-			0:

Tiogosadang, 6 Maret 2014. KEPALA DESA TLOGOSADANG

HI. MASYRIFATUN

CAMATA

Lampiran

: Peraturan Desa Tiogosadang

Nomor

: Tahun 2014

Tanggal

Perihal

: Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tiogosadang Tahun Anggaran

2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

1.1	1.	POS PENI	олрата N			_	05 750 000
1.2.1.1 Bagi Hasii Pajak PBB Rp. 7,500.000	1.		Pendacata	an Asli Desa 🗸		: Rp.	65.750.000
1.3 Bagi Hasil Restribus SRp. Use Santua Keuengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan lainnya SRp. 133.150.000 Cost. SRp. Tos. Cost. SRp. Tos. Cost. SRp. Tos. Cost. SRp. Cost.							
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan lainnya Rp. 133.150.000 1.5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				: Rp.	0
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan lainnya			Bantuan K	(euangan Pemerintah, Pemerintah	1		
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat 1.6 Hibah 1.7 Sumbangan Pihak ketiga 2.8 POS BELANJA 2.1 Belanja Langsung 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.2.2 Belanja Modal 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.3 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa 2.2.1.4.2 Purna Bhakti Kepala Desa 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 3.2.2.4.2 Belanja Operasional BPD 3.2.2.4.2 Belanja Sertifikat tanah kas Desa 3.2.2.3 Belanja Penghasilan Perangkat Desa 3.2.3 Belanja Penghasilan Perangkat Desa 3.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades 2.2.3.4 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades 3.2.3.5 Belanja Tembah Kerduga 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.1 Pengeluaran Pemblayaan 3.2 Pengeluaran Pemblayaan 3.3 Pengeluaran Pemblayaan 3.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2 Penyertaan Modal Desa 3.2 Penyertaan Modal Desa 3.2 Penyertaan Modal Desa 3.3 Pembayaran Ulang 3.3 Pembayaran Ulang 3.3 Pempayaran Ulang 3.3 Penpayaran Ulang 3.3 Pempayaran Ulang 3.3 Penpayaran Ulang 3.4 Penpayaran Ulang 3.5 Penpayaran Penpayan Penp		1.5	Propinsi F	Pemerintah Kabupaten / Kota dan	lainnya	: Rp.	_
1.6 Hibah 1.7 Sumbangan Pihak ketiga 2.1 POS BELANJA 2.1 Belanja Langsung 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2 Belanja Penghasilan Tetap HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa 2.2.6 Purna Bhakti Kepala Desa 2.2.1.4.2 Purna Bhakti BPD 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 3.2.2.4.8 Belanja Kegiatan Desa 2.2.4.8 Belanja Kegiatan Desa 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencelonan dan pemilihan Kades 2.2.3.3 Belanja Pencelonan dan pemilihan Kades 3.2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 3.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pemblayaan 3.3 Pempeyaran Utang 3.4 Penyertaan Dana Cadangan 3.2 Pengeluaran Pemblayaan 3.3 Pempeyaran Utang 3.4 Penpertaan Dana Cadangan 3.5 Pempeyaran Dana Cadangan 3.7 Penpertaan Dana Cadangan 3.8 Pempeyaran Utang 3.9 Penpertaan Modal Desa 3.9 Penpertaan Modal Desa 3.2 Pengeluaran Pemblayaan 3.2 Pengeluaran Pemblayaan 3.3 Penpeyaran Utang 3.4 Penpeyaran Utang 3.5 Penpeyaran Utang 3.2 Pengeluaran Pemblayaan 3.3 Penghayaran Utang 3.3 Penghayaran Utang 3.4 Pengeluaran Pemblayaan 3.5 Pengeluaran Pemblayaan 3.6 Pengeluaran Pemblayaan 3.7 Pengeluaran Pemblayaan 3.8 Pengeluaran Pemblayaan 3.9 Pengeluaran Pemblayaan		151	Rantuan K	Keuangan Pemerintah Pusat		; Rp.	•
2. POS BELANJA 2.1 Belanja Langsung 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 43.550.000 3.2.2 Belanja Modal Jumlah Rp. 63.000.000 2.2 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa Rp. 3.650.000 2.2.1.4.2 Purna Bhakti Kepala Desa Rp. 3.650.000 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD Rp. 3.650.000 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD Rp. 3.650.000 2.2.1.4 Belanja Kegiatan Desa Rp. 12.450.000 2.2.1.5 Belanja Sertifikat tanah kas Desa Rp. 12.450.000 2.2.1.6 Belanja Sertifikat tanah kas Desa Rp. 3.500.000 2.2.3 Belanja Pendentah Res Desa Rp. 40.000.000 2.2.3 Belanja Pendentah Res Rp. Rp. 40.000.000 2.3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pemblayaan Rp. 2.000.000 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pemblayaan Rp. 2.000.000 3. Penerimaan Pemblayaan Rp. Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp Rp. Rp Rp Rp Rp. Rp						; Rp.	75.000.000
2. POS BELANJA 2.1 Belanja Langsung 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa				an Pihak ketiga		: Rp.	0
2.1 Belanja Langsung Rp. 19.450.000 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 43.550.000 Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 68.800.000 Rp. 68.		1.7	Cambang		Jumlah	: Rp.	280.900.000
2.1 Belanja Langsung Rp. 19.450.000 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 43.550.000 Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 68.800.000 Rp. 68.		noc pel	A NI 1A				
Selanja Barang dan Jasa Rp. 43.550.000	2.			อกแรกต			
Selanja Belanja Hodal Jumlah Rp. 43.550.000						; Rp.	19.450.000
Selanja Node Jumlah Rp. 63,000,000			•			•	43.550.000
2.2 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa Rp. -		3.2.2	Belanja W	local	Jumlah		63.000.000
2.2 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa Rp. -		0.0	Balania T	idak Langsung	1	•	
HR + TPAD Kades dan Perangkat Desa			Delania P	enawai / Penghasilan Tetap			
2.2.6 Purna Bhakti Kepala Desa 2.2.1.4.2 Purna Bhakti BPD 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 2.2.1. Belanja Kegiatan Desa 2.2.4.2 Belanja Operasional BPD 2.2.4.8 Belanja Sertifikat tanah kas Desa 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.3.5 Belanja tak terduga 2.2.3.1 PMPM 2.2.3.1 PMPM 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.1 Pengeluaran Pembiayaan: 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.3.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.3.2 Penyertaan Modal Desa 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.4 Pengebayaran Utang 3.3.5 Pengebayaran Utang 3.3.5 Pengebayaran Utang 3.3.5 Pengebayaran Utang 3.3.650.000 3.68,		2.2	Delanja i	AD Kades dan Perangkat Desa		; Rp.	68.800.000
2.2.1.4.2 Purna Bhakti BPD 2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD 2.2.1. Belanja Kegiatan Desa 2.2.4.2 Belanja Operasional BPD 2.2.4.8 Belanja Sertifikat tanah kas Desa 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.3.4 Belanja tak terduga 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahuri sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.1 Pengeluaran Pembiayaan : 3.1.2 Rp. 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.4 Pengeluaran Pembiayaan : 3.2.5 Rp. 3.2.6 Rp. 3.2.6 Rp. 3.2.7 Rp. 3.2.7 Rp. 3.2.7 Rp. 3.2.8 Rp. 3.2.9 Penyertaan Modal Desa 3.2.9 Penyertaan Modal Desa 3.2.1 Penyertaan Modal Desa 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang		226				: Rp.	-
2.2.1.4.3 Penghasilan Tetap + TPAPD BPD Rp. 3.650.000						: R p.	•
2.2.1. Belanja Kegiatan Desa : Rp. 12.500.000 2.2.4.2 Belanja Operasional BPD : Rp. 12.450.000 2.2.4.8 Belanja Sertifikat tanah kas Desa : Rp. 3.500.000 2.2.3 Belanja Hibah : Rp. 75.000.000 2.2.3.1 PNPM : Rp. 40.000.000 2.2.3.2 Jalan Poros : Rp. 40.000.000 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades : Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD : Rp. 2.000.000 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD : Rp. 2.000.000 2.2.3.5 Belanja tak terduga : Rp. 2.000.000 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : Rp. 217.900.000 3. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 217.900.000 3. Pengeluaran Pembiayaan : Rp Rp. 3.1.2 Hasii Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp Rp. 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp Rp. 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp Rp.						: Rp.	
2.2.1. Belanja Operasional BPD 2.2.4.8 Belanja Sertifikat tanah kas Desa 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.6 Belanja tak terduga Jumlah 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : 3.3.1 Rp. 3.3.2 Rp. 3.3.3 Penyertaan Dana Cadangan 3.3.3 Penyertaan Modal Desa 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.3 Pembayaran Utang 3.3.4 Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.3.5 Rp. 3.3.6 Rp. 3.3.7 Rp. 3.3.7 Rp. 3.3.8 Rp. 3.3.9 Rp. 3.3.9 Rp. 3.3.9 Rp. 3.3.9 Rp. 3.3.0 Rp. 3.500.000 Rp.						: Rp.	12.500.000
2.2.4.2 Belanja Sertifikat tanah kas Desa 2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.6 Belanja tak terduga 2.2.6 Belanja tak terduga 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.3 Pembayaran Utang 3.3.500.000 Rp. 75.000.000 Rp. 40.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.			Belanja N	egialari Desa		-	12.450.000
2.2.3 Belanja Hibah 2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros Rp. 40.000.000 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD Rp. 2.000.000 2.2.6 Belanja tak terduga Jumlah Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.00			Belanja C	pperasional bro		•	3.500.000
2.2.3.1 PNPM 2.2.3.2 Jalan Poros 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD Rp. 2.2.6 Belanja tak terduga Jumlah Rp. 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.3 Pembayaran Utang 3.3.4 Penpayaran Utang 3.3.5 Pembayaran Utang 3.3.6 Rp. 3.3.7 Pembayaran Utang 3.3.8 Pembayaran Utang 3.3.9 Pembayaran Utang 3.3.9 Pembayaran Utang 3.3.0 Pembayaran Utang							
2.2.3.2 Jalan Poros : Rp. 40.000.000 2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades : Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD : Rp. 2.000.000 2.2.6 Belanja tak terduga Rp. 2.000.000 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp. 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp. 3.1.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp. 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp. 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.4 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.5 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.6 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.7		2.2.3				; Rp.	
2.2.3.3 Belanja Pencalonan dan pemilihan Kades : Rp. 2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD : Rp. 2.000.000 2.2.6 Belanja tak terduga : Rp. 2.000.000 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp. 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp. 3.1.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp. 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp. 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.4 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.5 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.6 Pembayaran Utang : Rp. 3.2.7 Pembaya						-	40.000.000
2.2.3.4 Belanja Pembentukan BPD 2.2.6 Belanja tak terduga Jumlah Rp. 2.000.000 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.3 Pembayaran Utang 3.2.4 Pembayaran Utang 3.2.5 Pembayaran Utang 3.2.6 Rp				Jalan Pulus	han Kades	-	•
2.2.6 Belanja tak terduga 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang Rp. 2.000.000 Rp. 217.900.000 Rp. -				Belanja Pericalonan dan perim			•
Jumlah : Rp. 217.900.000 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp							2.000.000
3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp. 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp. 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp. 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp. 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp.		2.2.6	Belanja ta	ak terduga	Jumlah		217.900.000
3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp			•		•		
3.1 Penerimaan Pembiayaan : 3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp	3.	PEMBIA'					
3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran SILPA Tahun sebelumnya : Rp 3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp		3.1	Penerim	aan Pembiayaan :			
3.1.2 Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan : Rp 3.2 Pengeluaran Pembiayaan : Rp 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp 3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp						. Do	-
3.1.2 Penjualah Aset yang diposition 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa 3.2.3 Pembayaran Utang : Rp			Tahun se	abelumnya		-	_
3.2 Pengeluarah Penbayaan : Rp		3.1.2	Hasil Per	njualan Aset yang dipisahkan		; Kp.	
3.2.1 Penyertaan Dana Cadangan : Rp.		2 2	Pengelu	aran Pembiayaan		•	•
3.2.2 Penyertaan Modal Desa : Rp. :						; Rp.	•
3.2.3 Pembayaran Utang : Rp. : Rp.						; Rp.	•
Jumlah : Rp.						: Rp.	
		3.2.3	ı Gilibayı	MI 2011 - A 1201 - C	Jumlah	: Rp.	•



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN NOMOR: 188/01/413.323.13.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN AȚAS RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOSADANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOSADANG,

- Menimbang
- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongann Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tlogosadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
 - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
 - 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentag Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

17. Peraturan Desa Tlogosadang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tlogosadang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlogosadang Pada tanggal 6 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOSADANG





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGOSADANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOSADANG KECAMATAN PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 188/02/413.323.13/2014

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Tlogosadang. Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014. Badan Permusyawaratan Desa Tlogosadang mengadakan rapat membahas racangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tlogosadang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogosadang Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA TLOGOSADANG Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan DESA TLOGOSADANG.

1. Supi'in

Ketua

2. Haryono, S.Ag

Anggota

3. Fakhruddin, S.Pd

Anggota

4. Siti Maftuhah

Anggota

5. Moh. Irfan

Anggota

6. Abd. Alim

Anggota

7. Kastokan

Anggota

Tanda Tangan: